

MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai karakter politik dan tipologi masyarakat kelas menengah Muslim Indonesia pascareformasi. Karakter tersebut menjadi penting dikaji untuk melihat basis-basis pembentukannya. Pada umumnya, kelas menengah Muslim Indonesia tumbuh karena dua sumber: intelektualisme dan borjuasi. Intelektualisme menandai adanya transformasi pemikiran Islam yang serba ortodoks dan puritan menjadi kritis. Sedangkan borjuasi menandai adanya pergeseran basis ekonomi yang semula bercorak agraris menjadi tergantung pada jasa, perdagangan, maupun birokrasi. Modernisasi menjadi kata kunci terhadap pembaruan kelas menengah Muslim Indonesia. Ia terbagi dalam tiga rentang waktu, yakni masa kolonialisme, pascakemerdekaan dan masa pascareformasi. Sejalan dengan modernisasi tersebut, arah partisipasi dan representasi politik kelas menengah Muslim Indonesia kemudian berkembang ke dalam ranah politik maupun non-politik. Secara politis, pendirian partai politik merupakan solusi bagi mereka dalam mengartikulasikan kepentingannya. Sedangkan, secara non-politis atau kultural, mereka umumnya terepresentasikan dalam kegiatan keagamaan dan pengajian kaum elit.

[This article aimed to analyze about political character of Indonesia Muslim middle class in postreformation era. In addition to analyze, this article is also describe the typology of Indonesian Muslim middle class. That typologies are becoming important to observe the establishment bases of Indonesian Muslim

middle class. In general terms, Indonesian Muslim middle class have grown up due to intellectualism and bourgeois. Intellectualism has indicated such transformation from traditional thinking method based on pesantren to critical studies. Meanwhile, bourgeois indicated transformation from farming activities towards trade, bureaucracy, and manufactures. In other words, modernization is pivotal words among Indonesian Muslim middle class which divided into three parts; colonialization, republicanism, and post-reformation era. Those three parts have own modernization characteristic. In line with that growth pattern, political party establishment is sole solution among Indonesian middle class to articulate their political interest. Furthermore, middle class who were not in political struggle tend to creating "majelis ta'lim" and other forms. It is came to conclusion that society strengthening is ultimate option to carry out political interest and representation. This article will elaborate more deeply about political participation among Indonesian Muslim middle class.]

Kata kunci: Kelas Menengah Muslim, Partisipasi Politik, Pascareformasi

Pendahuluan

Representasi kultural maupun juga advokasi politik merupakan dua poin utama dalam membahas partisipasi politik kelas menengah Indonesia pada masa pascareformasi sekarang ini.¹ Partisipasi menjadi penting dibicarakan mengingat selama ini demokrasi telah sedemikian beragam sehingga mendorong adanya saluran aspirasi yang meluas. Hal tersebut juga berlaku bagi kelas menengah Muslim dalam upaya mengartikulasikan aspirasi politiknya. Karakter demokrasi Indonesia menunjukkan adanya relasi antara ranah pribadi dan kewargaan melalui penegakan aturan hukum; kaitan antara ranah politik dan masyarakat dengan membuka organisasi sipil maupun juga organisasi politik; serta relasi antara ranah politik maupun juga negara (lembaga trias politika

¹ Gerry Van Klinken & Ward Berenschot, *In Search of Middle Indonesia* (Leiden, Brill, 2014), h. 179.

dan partai politik) yang semakin padu.² Dengan kata lain, keterbukaan politik formal dalam ranah negara perlu diimbangi dengan adanya saluran partisipasi politik informal publik.

Posisi kelas menengah Muslim dalam membangun saluran partisipasi politiknya dilakukan melalui lembaga partai politik. Namun sebelum pembentukan partai politik, kelas menengah melakukan presentasi budaya untuk menegaskan representasi kultural melalui jilbab, lagu kasidah, ICMI, Republika dan *majelis ta'lim*.³ Kelima bentuk presentasi budaya itu merupakan langkah awal sebelum berkonsolidasi membentuk partai politik. Kemunculan partai politik berbasis Islam bisa dilihat dari berbagai macam institusi: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun kemudian, berbagai macam partai politik tersebut belum segaris dengan upaya membangun saluran partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia secara keseluruhan. Ditinjau dari faktor historis, perolehan suara partai politik Islam cenderung fluktuatif. Pada pemilu 1955, suara partai Islam melalui Partai NU dan Masyumi mencapai 43,9 persen, kemudian turun menjadi 16 persen pada pemilu 1987.⁴ Sedangkan pada masa reformasi hingga sekarang ini, pemilu 1999 mencata suara sebesar 34,2 persen, pemilu 2004 mencatatkan kenaikan sebesar 43,27 persen, dan pemilu 2009 mengalami penurunan 30 persen suara.⁵ Adapun pada

² Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), h. 25. Hal itu juga disinggung oleh Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia* (Singapore, NUS, 2015), h. 447.

³ Moeflich Hasbullah, "Cultural Presentation of the Muslim Middle Class in Contemporary Indonesia, dalam *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2, 2000, h. 15-20.

⁴ Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 36.

⁵ Partai Politik Islam mencapai puncak kejayaannya pada pemilu 1999, yang ketika itu banyak partai politik Islam disokong oleh tokoh Muslim terkemuka misalnya saja K.H Abdurrahman Wahid maupun Amien Rais. Selengkapnya lihat di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/15/mlajoy-ini-penyebab-parpol-islam-selalu-kalah>, diakses tanggal 13 September 2016.

pemilu 2014 lalu, perolehan partai politik Islam mencapai 31,39 persen.⁶

Poin penting dalam mengulas naik-turunnya angka perolehan suara partai politik Islam tersebut, apakah ia merupakan cerminan dari partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia secara keseluruhan? Hal ini penting mengingat pada pascapemilu 2014, pola partisipasi politik semakin mengalami penguatan di kalangan kelas menengah Muslim Indonesia. Selain itu, faktor kuat lain yang memengaruhi adalah Islam di Indonesia tidaklah selalu menjadi kekuatan politis secara utuh, namun juga bisa berarti kekuatan sosial yang menyeluruh. Maka, tulisan ini akan mengupas secara lebih lanjut mengenai pembangunan partisipasi politik kelas menengah Muslim dalam demokrasi Indonesia.

Karakter Kelas Menengah Muslim Indonesia

Membaca perilaku memilih dalam kasus kelas menengah Muslim Indonesia berbeda dengan segmen kelompok kelas menengah Indonesia lainnya. *Pertama*, kelompok kelas menengah Muslim hadir dari kelompok marjinal karena implikasi otoritarianisme rezim. Kelas menengah Muslim bukanlah kelas yang dibentuk oleh negara untuk mendorong ekonomi. Kelompok kelas menengah Muslim hadir karena ketertindasan politik dan ekonomi. *Kedua*, semangat kolektivitas politik tinggi mengingat dalil agama digunakan sebagai dasar pembentuk gerakan. *Ketiga*, hubungan dengan negara cenderung bertindak sebagai oposisi, namun juga bisa adaptif. *Keempat*, sikap kelompok kelas menengah Muslim dalam menerima demokrasi memiliki beragam pemaknaan, yakni ada yang menerima, menolak, bahkan pragmatis. *Kelima*, politik kelas menengah Muslim Indonesia dipengaruhi tidak hanya dalam konteks politik nasional saja,

⁶ Kenaikan satu persen suara bagi partai politik Islam pada pemilu 2014 dipengaruhi oleh semangat inklusivitas yang diterapkan oleh partai politik Islam misalnya PPP, PKB dan PKS. Selengkapnya bisa dilihat di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgy5-ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014>, diakses tanggal 13 September 2016.

namun juga politik internasional.⁷

Berbagai wacana keislaman yang timbul di negara-negara dunia Islam turut memengaruhi konteks partisipasi politik kelas menengah Muslim di Indonesia. Hal ini dikarenakan semangat kolektivitas sebagai *ummah* yang berlaku secara global. Maka, tidaklah mengherankan apabila konteks partisipasi politik kelas menengah Indonesia membawa agenda global politik Islam ke dalam konstalasi politik nasional. Menyadari hal itu maka konteks Islam berkembang menjadi kekuatan politik yang berusaha melebur. Mengingat bahwa spirit Islam juga membawa militansi dan radikalisasi perubahan yang tentu membawa perubahan fundamental terhadap suatu negara. Hal itulah yang mendorong pemerintah sejak rezim kolonial hingga republik melakukan pengaturan terhadap agama di Indonesia terutama Islam. Sedangkan umatnya diberlakukan secara kondisional untuk terus diawasi oleh rezim. Pengawasan itu menjadi penting untuk menekan adanya partisipasi politik umat yang mengarah pada pembentukan negara Islam. Secara historis, kemuculan kelas menengah Muslim di Indonesia merupakan warisan dari sistem masyarakat pluralis yang menciptakan adanya demarkasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut sejatinya menciptakan adanya marginalisasi dan ketimpangan kelas. Konteks masyarakat pluralis yang ditekankan oleh Furnivall dalam melihat formasi awal terbentuknya masyarakat Indonesia baik sebelum dan sesudah kolonialisme menjadi titik analisis penting yang perlu dicermati. Istilah masyarakat pluralis adalah istilah akademik untuk menganalisis adanya relasi masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas, namun tersegregasi berdasarkan pada basis rasial dan juga kontribusi terhadap perekonomian.⁸

Pembagian kelas yang berdasarkan pada ketiga kelompok, yakni kelompok masyarakat Eropa, kelompok masyarakat Timur

⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia", dalam Jurnal *Teosofi*, Vol. 5, No. 1, 2016.

⁸ J. S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (London: Cambridge University Press, 1967).

Jauh, dan masyarakat pribumi mengindikasikan bahwa unsur etnisitas dan kepemilikan sumber ekonomi menjadi utama. Dengan kata lain, kelas menengah yang menjadi golongan menengah (*middle men*) adalah kelompok masyarakat Tionghoa dan Arab. Islam pada awalnya diidentifikasi dengan Arab, namun perlahan Islam berupaya mencari basis baru dengan membentuk kelompok masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Konteks muncul dan naiknya Islam ke dalam panggung politik Indonesia di awal abad 20 telah menggeser adanya stratifikasi sosial kelas sosial dalam masyarakat tersebut. Kelas menengah Muslim adalah akulturasi masyarakat pribumi dengan Islam sehingga menciptakan kelas masyarakat baru dengan mencoba membedakannya dengan masyarakat Eropa dan Tionghoa. Islam berusaha untuk mengadaptasikan diri dengan berupaya membentuk masyarakat baru sebagai bentuk jalur dakwah, sementara pribumi ingin diakui sebagai kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Dua kondisi itulah yang pada akhirnya menciptakan Islam di Indonesia menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal sehingga menciptakan Islam yang khas.

Faktor penting yang perlu ditekankan dalam melihat kelas menengah Muslim adalah faktor modernitas. Hal itu merupakan esensial karena kemunculan kelas menengah dikaitkan dengan adanya sentuhan teknologi dan pertumbuhan kapitalisme produksi. Menjadi menarik ketika melihat konteks pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya terjadi di negara dunia ketiga senantiasa disponsori oleh rezim negara. Konteks itu pulalah yang menciptakan adanya dua dikotomi kelas menengah, yakni kelas menengah sekular dan kelas menengah Muslim. Kelas menengah sekular adalah kelompok kelas menengah yang teristimewakan dan terfasilitasi oleh rezim pemerintah sedangkan kelompok kelas menengah Muslim adalah mereka yang teralinesikan oleh negara.

Pergulatan Diskursus Kelas Menengah Muslim Indonesia

Adanya konteks yang teristimewakan dan tertindas kemudian mendorong adanya bentuk partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia dalam penciptaan wacana baru: modernisme alternatif.⁹ Pengertian modernisme alternatif tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pencarian jalur modernisme lain yang tidak hanya mengandalkan adanya linearitas ekonomi, namun juga perbaikan moralitas. Adapun wacana ini mendasarkan diri kepada kritik terhadap modernisme yang dianggap mengedepankan asketisme, namun miskin moralitas.¹⁰ Kondisi itulah yang mendorong modernisme baru berlandaskan nilai-nilai agama. Hal itu juga berarti adanya komoditisasi nilai-nilai agama dalam bentuk konsumerisme. Dengan kata lain, Islam menerima adanya konsumerisme yang kemudian dipraktikkan dalam konteks produk syariah. Produk itulah yang membedakannya dengan produk yang dianggap sekular lainnya. Sedangkan dalam konteks “Muslim demokratis” secara sederhana dapat disimpulkan sebagai bentuk penerimaan umat Islam terhadap demokrasi sebagai sistem politik.¹¹ Dengan kata lain, kelas menengah Muslim Indonesia masih memiliki eksklusivitas dan kolektivitas sebagai suatu kelompok. Kedua wacana akademik itulah yang kemudian merumuskan partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia lebih memilih jalur moderat, namun tetap kritis dengan negara. Adanya sikap moderat yang menjadikan posisi kelas menengah Muslim Indonesia menjadi unik dibaca. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, mereka ingin mendapatkan saluran representasi dan advokasi, sekaligus otonomi politik tersendiri.

⁹ Sonja van Wichelen, *Religion, Politics and Gender in Indonesia: Disputing the Muslim Body* (New York: Routledge, 2010), h. 70.

¹⁰ Wasisto Raharjo Jati, “Agama dan Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agama”, dalam Jurnal *Al-Qalam*, Vol. 30, No. 2, 2013, h. 266.

¹¹ Nilai-nilai demokrasi dalam Islam dikenal dalam berbagai istilah seperti halnya *syura*, *ikhtilaf*, *ijtihad*, dan juga *ijma* merupakan mekanisme pencapaian permusyawaratan dalam Islam. Selengkapnya Islam tidak mengenalkan adanya liberalisme dan lebih percaya konsep *ummah*. Selengkapnya bisa dilihat di Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 27-28.

Agenda politik kelas menengah Muslim Indonesia sendiri berganti setiap periode mulai dari isu *kebilafah*, moral dan syariah. Institusionalisasi partai politik berbasis Islam merupakan bagian dari aspek agenda politik tersebut. Namun kini agenda politik tersebut lebih berperan pada pembentukan organisasi akar rumput yang memiliki kekuatan sebagai kelompok penekan di masyarakat maupun pemerintah dengan seraya mempertahankan basis nilai-nilai Islam.

Studi sosial politik mengenai perilaku memilih kelas menengah Muslim berkembang dalam dua ranah besar, yakni modernis maupun tradisional. Kedua spektrum tersebut merupakan cara mudah untuk melihat sejauh mana perilaku politik kelas menengah Indonesia dibentuk. Hal tersebut mengingat bahwa konteks Islam di Indonesia kemudian mengarah pada bentuk modernitas maupun juga pribumisasi Islam. Keduanya sebenarnya bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai nilai-nilai publik di Indonesia dalam kerangka *civil religion*. Terlebih keduanya merupakan cerminan dari karakter kelas menengah Muslim Indonesia yang terafiliasi terhadap dua organisasi besar Islam di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Hal itulah yang kemudian berimplikasi penting pada pilihan politik kelas menengah Muslim Indonesia, yaitu apakah mengarah pada partai berbasis massa atau partai berbasis kader. Dalam situasi kekinian, terjadi transformasi politik dalam kelas menengah Islam yang semula berbasis massa kini perlahan mulai menjadi berbasis kader. Kedua bentuk organisasi massa Islam terbesar di Indonesia tersebut sebenarnya juga mewakili saluran partisipasi politik kelas menengah Muslim dalam menyikapi demokrasi sebagai nilai bersama. Persinggungan Islam dan demokrasi selama ini menjadi simpul penting dalam melihat partisipasi. Namun juga penting untuk melihat adanya perbedaan antara keduanya yang kemudian bisa dirumuskan dalam nilai ideal mengenai partisipasi yang diinginkan.

Kuntowidjojo dalam berbagai karya klasiknya, *Muslim Kelas Menengah* menyebutkan bahwa dalam Masa Orde Lama partisipasi politik kelas menengah telah memasuki periode ideologi, setelah sebelumnya bernuansa *wong cilik*.¹² Kuntowidjojo melihat bahwa kemunculan kelas menengah Muslim di Indonesia merupakan sejarah marjinalisasi maupun juga periferalisasi yang menyebabkan masyarakat Muslim menjadi kelas masyarakat kedua. Hal itulah yang menyebabkan hubungan umat Islam dan negara menjadi hubungan yang diakronis? Oleh karena itulah, pemahaman partisipasi politik bagi kelas menengah Muslim pada masa Orde Lama adalah masuk dalam ranah politik formal, bersaing dengan kelompok nasionalis melalui mendirikan partai politik berbasis Islam, dan berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem negara. Namun demikian advokasi kemudian diberangus oleh rezim Orde Baru yang kemudian menyederhanakan politik dan kemudian memarjinalkan kelompok Islam dengan mengembangkan kelompok radikal. Dari itulah, partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia kemudian mengalami percabangan antara melakukan perubahan dengan konstitusional dengan memeluk demokrasi, pasif secara politik dengan fokus membangun Islam, maupun juga mengadopsi nilai-nilai militan. Dalam konteks itulah, gagasan Muslim demokrat yang merupakan amalgamasi nilai-nilai demokrasi dan Islam yang diselaraskan dengan Pancasila pada pascareformasi. Gagasan Muslim demokrat ini dipandang sebagai jalan tengah untuk mendamaikan kedua kutub tersebut. Hal demikian dilihat dari adanya kesamaan pandangan Islam dan demokrat; mementingkan konsensus dan kauskus publik.

Terkait dengan pilihan partai politik sebagai mekanisme sah partisipasi politik kelas menengah Muslim saat itu. Masyarakat kelas menengah memandang bahwa pembangunan politik perlu disesuaikan pada kaidah nilai Islam. Maka dengan melembagakan diri dalam partai,

¹² Kuntowidjojo, "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950", dalam *Prisma*, No. 11, 1985.

kelompok kelas menengah Muslim akan lebih mudah dalam melakukan infiltrasi nilai-nilai Islam secara lebih luas. Selain halnya motivasi pembangunan politik, premis lain yang perlu digarisbawahi adalah penguatan massa Islam itu sendiri. Keberadaan Islam sebagai kekuatan politik telah memberikan dampak luas pada kontestasi internal umat yang menitikberatkan kelas menengahnya sebagai motor penting. Kontestasi itu disebabkan adanya sikap “setengah hati” umat Muslim dalam menerima demokrasi dan Pancasila sebagai nilai konsensus bersama.

Pergulatan itulah yang hingga kini masih mengendap hingga hari ini. Islamisme masih dianggap nilai ideal oleh sebagian kelompok kelas menengah Muslim Indonesia, meskipun sebagian besar telah menerima Pancasila dan demokrasi sebagai nilai yang selaras dengan Islam. Implikasinya dari kedua bentuk wacana tersebut berimplikasi pada bentuk mula partisipasi kelas menengah Muslim yang kemudian menginginkan adanya otonomi politik secara eksklusif. Masyarakat kelas menengah Muslim ingin membangun model ideal masyarakatnya sendiri sesuai dengan model masyarakat madani. Pergulatan politik semacam itulah yang kemudian berimbas pada pandangan partisipasi kelas menengah Muslim Indonesia terhadap demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut dikarenakan terjadi perbedaan cukup mendalam antara partisipasi politik yang diimban oleh kelas menengah Muslim Indonesia dengan partisipasi politik yang terdapat dalam konsepsi demokrasi, yang ternyata memiliki persamaan maupun perbedaan yang cukup signifikan untuk dikaji lebih aktual. Secara lebih lengkap komparasi pandangan partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia dengan demokrasi sebagai berikut ini.

Tabel 1: Komparasi Pandangan Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia

No	Parameter Nilai Partisipasi Politik	Demokrasi	Islam
1	Relasi dan Bentuk terhadap Negara	Negara-bangsa	<i>Khilafah</i>
2	Penyampaian Gagasan	Individual	Kolektif

3	Konsensus Publik	Musyawarah untuk mufakat	<i>Ijtihad</i>
4	Posisi Individu	Subjek politik aktif	<i>Ummah</i>
5	Regulasi	<i>Reward and punishment</i>	<i>Order and judgement</i>

Sumber: Diolah dari berbagai macam data

Dalam melihat perilaku memilih kelas menengah Muslim Indonesia dapat dilihat dari seberapa intens dalam mengafiliasi dan mengafinitaskan diri pada sebuah kekuatan politik tertentu. Premis tersebut terkait dengan upaya membangun kolektivitas politik yang hendak dibangun oleh kelas menengah Muslim tersebut. Mayoritas studi perilaku pemilih mendasarkan pada teori perilaku memilih yang dikembangkan oleh Almond dan Verba: *subjektif-partisipan-parochial*.¹³

Trikotomi tersebut sebenarnya dikembangkan berdasarkan pada pengalaman pemilih, apakah mengembangkan rasionalitas, kolegialitas, maupun hanya sekadar aksidental dalam perilaku memilih. Temuan trikotomi tersebut pada dasarnya merupakan hasil riset yang didapatkan dari studi komparasi yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara yang masih diselembungi praktik-praktik patrimonialisme. Keadaan itu yang kemudian menyulitkan ketika demokrasi dan Islam hadir di saat bergantian. Patronase masih hidup sembari memeluk nilai-nilai demokrasi dan Islam. Prinsip patrimonialisme yang semula berbasis pada hubungan ketergantungan langsung sifatnya mutualistik, kini perlahan mengendur. Penyebabnya adalah munculnya kelompok masyarakat baru yang berada di tengah antara kelas penguasa dan kelas paria. Munculnya kelompok kelas menengah menjadi hal yang dipersoalkan ketika kelompok masyarakat ini mencoba untuk mengambil otoritas tersendiri daripada membentuk hubungan diakronis. Namun kemudian, kelompok kelas menengah ini

¹³ Almond dan Verba dalam Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

kemudian membangun model patrimonialismenya sendiri yang berbasis pada kepentingan. Artinya bahwa hubungan kolegiat-kolektif kini sudah terganti pada hubungan temporer-pragmatis

Embrio Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim

Perilaku memilih kelas menengah Muslim sendiri pada dasarnya bersikap rasional dan pragmatis. Hal tersebut sebenarnya mengikuti basis kelas menengah tersebut yang pada umumnya berasal dari kalangan borjuasi dan intelektual. Namun demikian, meskipun memiliki akar sama dengan kelas menengah pada umumnya. Mereka cenderung untuk mengedepankan adanya nilai-nilai agama maupun juga moralitas dalam pertimbangan memilih. Isu-isu keagamaan begitu menguat dan mengental dalam pembahasan perilaku memilih. Premis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi penting untuk dicatat dalam membahas perilaku memilih tersebut. Islam adalah cita-cita dan politik adalah instrumentasinya. Hal yang perlu dicatat adalah meskipun mengedepankan nilai dan norma sebagai basis utama, nilai-norma tersebut tidak menyentuh pada level substansi utama yang menjadi preferensi penting perilaku memilih. Namun lebih pada tataran simbolisnya saja dan lebih pada pemahaman secara normatif. Karakter pemahaman keislaman kelas menengah Muslim kontemporer sekarang ini tidaklah sampai pada level substantif, namun lebih pada level pemahaman praktisnya saja. Oleh karena itulah yang mendorong perilaku memilih yang ditunjukkan oleh mereka sendiri cenderung menempatkan diri pada personifikasi nilai norma yang melekat pada figur. Mereka adalah kalangan priyayi-santri yang menjadi embrio penting dalam posisi kelas menengah Muslim ini.

Kelompok priyayi-santri sebenarnya merupakan embrio awal kemuculan kelas menengah Muslim di era modern yang diinisiasi saat menjelang akhir Orde Baru. Adanya pengaruh kuat iklim depolitisasi turut mengubah watak militansi tersebut dengan membentuk karakter kelas menengah Muslim yang sifatnya lebih pragmatis dan praktis. Watak

politik yang mereka tampilkan sendiri cenderung melihat simbol daripada substansi.¹⁴ Pertumbuhan kota-kota besar yang berada di Indonesia ternyata tidak hanya menyuburkan adanya sekularisasi dan modernisme belaka. Namun di sisi lain juga menciptakan adanya kesalahan kolektif. Selain halnya permasalahan nilai dan norma disesuaikan dengan kaidah Islam, hal lain yang perlu untuk dilihat adalah peran patronase. Dalam hal ini, peran seorang alim seperti ustaz, kiai, maupun ulama dalam mengarahkan perilaku memilih begitu kuat. Mereka mempunyai pengaruh kuat melalui institusionalisasi semisal nya pesantren maupun juga masjid. Melalui kedua institusi tersebut, perilaku kelas menengah Muslim kemudian dibentuk secara kolektif berdasarkan pada preferensi sang ulama tersebut. Biasanya model perilaku memilih yang seperti ini berlaku bagi mereka yang tinggal di kawasan pedesaan yang notabene masih terikat norma dan perilaku adat. Peran pesantren menjadi indikator penting dalam proses inkubasi sosial politik bagi kelompok kelas menengah Muslim berbasis pedesaan. Pesantren biasanya saling terafiliasi satu sama lain sehingga membentuk suatu aliansi besar seperti halnya Poros Langitan yang berada di Jawa Timur.

Studi yang dilakukan oleh Endang Turmudi memperlihatkan bahwa pesantren menjadi basis penting pembentukan preferensi memilih yang dilakukan oleh kelas menengah Muslim Indonesia. Faktor figuritas menjadi tolok ukur utama dalam melihat seberapa militan dan kolektif preferensi politik kelas menengah tersebut dibentuk. Pesantren dan peran ulama merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan satu sama lainnya dalam memainkan peran mereka berdua sebagai broker kultural. Fungsi broker sendiri tidak hanya berperan sebagai aktor pemberi preferensi utama pilihan politik, tapi juga dalam menjaga norma dan perilaku masyarakat. Kondisi itulah yang kemudian menuntun perilaku memilih kelas menengah tersebut mengarahkan diri kepada partai berbasis massa.

¹⁴ Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (New York: Oxford University Press, 2015), h. 35-38.

Dalam kasus ini, kemenangan NU pada pemilu 1955 yang masuk ke dalam posisi empat besar partai pemenang juga ditentukan oleh keberadaan para santri dan ulama pesantren ini. Kolektivitas dalam menentukan perilaku memilih tersebut bisa dilihat dalam membentuk pandangan mengenai masyarakat yang sepenuhnya dilihat sebagai masyarakat ideal seperti yang bisa dilihat dalam tabulasi berikut ini:

Tabel 2: Preferensi Pilihan sebagai Masyarakat¹⁵

No	Parameter Masyarakat Ideal	Prosentasi Pemilih
1	Masyarakat Sejahtera	26,9 persen
2	Masyarakat Bermoral	17,0 persen
3	Masyarakat Berhukum Islam	32,4 persen
4	Masyarakat Seimbang duniawi dan ukhrawi	9,9 persen
5	Masyarakat aman dan harmonis	5,5 persen

Menguatnya pesan kebutuhan moral dan syariah itulah yang menjadi refleksi penting terbangunnya perilaku memilih kelas menengah Muslim Indonesia. Dengan kata lain, pemahaman mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi sesuatu yang esensial dalam perilaku memilih kelas menengah. Maka, pembentukan masyarakat menjadi benteng terakhir bagi mereka untuk mengartikulasikan identitas maupun kolektivitasnya. Termasuk pula dalam membentuk perilaku memilih. Masyarakat Muslim memiliki kecenderungan perilaku *grouping* dalam mengekspresikan identitas politiknya baik itu melalui kendaraan partai politik maupun non partai politik. Konteks modernis maupun tradisionalis masih menjadi corak utama dalam pola *grouping* tersebut. Namun demikian dibandingkan dengan kelas menengah Muslim tradisional, profil sosial yang ditampilkan oleh kelas menengah Muslim modernis lebih majemuk dan variatif.¹⁶ Pengertian profil sosial sendiri dimaksudkan artikulasi eksistensi dan koeksistensi suatu kelompok masyarakat dalam sistem sosialnya masing-masing. Dibandingkan dengan perilaku sosial yang ditampilkan kelompok

¹⁵ Endang Turmudi, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2004), h. 302.

¹⁶ Adam Schwarz dan Jonathan Paris, *The Politics of Post-Subarto Indonesia* (New York: Brooking Press, 1999).

tradisionalis yang masih bercorak agraris dan militan dalam politis. Kelompok Muslim kelas menengah modernis hadir dari kelompok neo priyayi-santri yang banyak bertransformasi menjadi kalangan pedagang dan birokrat. Artinya bahwa komposisi kelas menengah Muslim modernis tidaklah selalu hadir dari kalangan agamis, namun juga kalangan awam yang kemudian menjadi agamis. Konteks “menjadi Islam” (*being Islam*) menjadi premis penting yang perlu dicatat dalam melihat perilaku memilih kelas menengah kekinian.

Kelompok *being Islam* lebih banyak tumbuh di kalangan masyarakat perkotaan yang membutuhkan adanya nilai dan norma pegangan kuat terhadap agama. Bagi mereka, mengenakan adanya jilbab, tasbih, maupun juga surban adalah menunjukkan kesalehan dan bentuk ketaatan yang mereka ekspresikan sebagai bagian dari masyarakat islami. Dengan kata lain, memilih partai politik Islam bisa merupakan bagian dari ekspresi *being Islam* tersebut yang diejawantahkan dalam afiliasi terhadap partai politik. Partai politik Islam masih dianggap sebagai aktualisasi partisipasi politik kelas menengah Muslim untuk merengkuh kekuasaan melalui jalur politik. Namun demikian, konsensus politik yang dilakukan oleh kelas menengah Muslim kini juga sudah sedemikian pluralis baik melalui kegiatan *ta'lim*, bergabung dalam ormas, maupun juga menjadi pengurus partai. Oleh karena karakter partisipasi politik yang mereka tampilkan beraneka ragam menunjukkan adanya wajah politik yang abu-abu. Dikatakan sebagai modernis juga bukan, begitupun juga dikatakan sebagai kalangan tradisionalis dalam kehidupan sosial. Namun demikian bila dikaitkan dengan partisipasi politik, kelas menengah bisa menampilkan diri dalam berbagai bentuk kelompok kecil. Berbagai macam kelompok kecil tersebut biasanya terafiliasi dengan kelompok *majelis ta'lim* maupun kelompok tarekat di masyarakat. Mereka memiliki solidaritas cukup kuat di kalangan masyarakat.

Sebagai contoh, eksistensi PKS banyak didukung kalangan kelas menengah Muslim yang menjadi *ikhwan* dan PKB yang mayoritas

dipilih oleh kalangan kelas menengah yang berbasiskan pada kalangan pesantren. Secara khusus, partai politik Islam yang notabene berbasis kader, khususnya PKS yang mengembangkan jaringan ikhwan begitupun juga PKB melalui jaringan santrinya. Definisi ikhwan dan santri tersebut merupakan gambaran sederhana untuk melihat perilaku memilih yang berkembang dalam kelas menengah Muslim. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa definisi santri maupun ikhwan berkembang dalam bentuk neo santri, neo ikhwan maupun juga santri ortodoks yang itu memperlihatkan tingkat pemahaman nilai dan norma Islam yang berbeda. Perbedaan tingkat pemahaman tersebut salah satunya juga dipengaruhi relasi politis Islam dengan negara. Sejarah menunjukkan bahwa relasi kedua entitas sangatlah fluktuatif dibandingkan dengan kelompok nasionalis yang lebih cair dalam relasinya dengan negara. Kelompok masyarakat Muslim memiliki semangat resistensi baik sifatnya laten maupun manifes kepada negara. Perilaku memilih demikian itu terdapat dalam kelompok kelas menengah Muslim yang beraneka ragam. Oleh karena keragaman itulah, yang membuat peta partisipasi politik kelas menengah Muslim menjadi bervariasi. Ada yang memilih menjadi bagian negara, bagian *ummah* global, bagian dari komunitas lokal dan bagian dari tarekat.

Tipologi Partisipasi Kelas Menengah Muslim Indonesia

Menyadari akan partisipasi kelas menengah Muslim yang beranekaragam tersebut maka pemilahan mengenai partisipasi politik kelas menengah Muslim dapat dikategorikan menjadi tiga: konstitusional, ekstra-parlementer dan radikalisme. Ketiganya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda pula dalam melihat aspek luaran berupa representasi yang ingin dihasilkan. Adanya perbedaan ketiga macam saluran tersebut sebenarnya mencerminkan kondisi politik yang dihadapi oleh kelas menengah Muslim. Bagi kelas menengah Muslim yang berbasis di kelompok perkotaan, orientasi politik untuk menuju arah kekuasaan

sebenarnya sudah semakin mengendur. Hal ini dikarenakan kelompok kelas menengah Muslim sudah semakin terasimiliasi dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun bagi kelompok kelas menengah Muslim yang berbasiskan pada kelompok dakwah, isu syariah menjadi wacana esensial yang perlu diperjuangkan. Hal itu yang menjadikan partai dakwah menjadi pilihan penting. Premis penting dalam melihat kondisi partisipasi politik kelas menengah Muslim sekarang ini adalah apakah hanya cukup partai politik sebagai kendaraan politik mereka. Sekarang ini, bagi partisipasi politik kelas menengah Muslim yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, akan tergabung dalam kelompok kecil. Namun paling tidak, pilihan mengikuti jalur pemilu adalah cara politis untuk mempertahankan eksistensi kelas menengah Muslim sebagai kelompok penekan. Selain itu juga sebagai *bargaining politics* dengan kelompok nasionalis dalam membentuk pemerintahan. Posisi *bargaining politics* dengan menjadi kelompok kepentingan maupun kelompok penekan merupakan cara sah dalam melakukan komunikasi politik dengan negara dan kelompok nasionalis.

Jalur pertama, jalur partisipasi konstitusional bisa dimaknai sebagai jalur politik melalui partai politik. Kecenderungan untuk mendirikan partai politik rupanya masih terjaga di alam sadar kelas menengah Muslim Indonesia. Secara sadar, menghadapi kelompok nasionalis tidak perlu lagi dengan menggunakan arena massa terbuka. Namun cukup bertarung secara terbuka di ranah pemilu. Adapun cerminan dan figur partai politik yang mengatasnamakan Islam sebagai identitas beraneka ragam jenis. Mulai dari kelompok Islam modernis, Islam populis, Islam tradisional, maupun faksi Islam lainnya. Hal yang perlu dicatat adalah meskipun *platform* partai politik Islam tersebut beraneka renik, namun tujuan akhir partai politik Islam tersebut belum tentu mengarah kekuasaan. Akan tetapi mengarahkan pada bentuk preservasi kekuasaan dan pengaruh politik dalam lingkup kecil.

Jalur kedua, jalur ekstra parlementer dipilih ketika partisipasi politik melalui jalur konstitusional dirasa tidak menemui hasil. Hal itulah yang mendorong pertumbuhan adanya kelompok *uncivil society* dalam kelompok kelas menengah Muslim sendiri. Dengan kata lain, mereka menjadikan negara sebagai simbol penting untuk dijadikan objek resistensi bagi kelompok kelas menengah ini. Bagi mereka yang menempuh jalur ini, partisipasi melalui jalur politik formal adalah sesuatu yang diharamkan. Akan lebih baik apabila partisipasi itu dijalankan melalui mekanisme kelompok penekan, agar memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Mekanisme demokrasi yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengindikasikan bahwa kedaulatan manusia adalah segalanya. Maka, isu moralitas hingga kemudian kecaman terhadap demokrasi menjadi identitas politik penting dalam membentuk partisipasi politik. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam jalur partisipasi ini hadir tidak hanya dari kelompok Salafi-Tradisional, namun juga kelompok Islam Transnasional yang mencoba menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Hadirnya berbagai macam organisasi masyarakat berwujud Hizbut Tahrir, MMI, dan lain sebagainya merupakan bentuk eksistensi dari partisipasi politik melalui jalur kedua tersebut.

Jalur ketiga, kelompok radikalisme ini merupakan fase lanjutan dari jalur partisipasi kedua, manakala gerakan konstitusional maupun juga ekstra parlementer tidak berhasil. Adapun sifat jalur partisipasi ini lebih bercorak emosional daripada ideologis. Munculnya berbagai macam faksi radikal baik itu yang muncul secara laten maupun manifestasi itu merupakan bentuk rasionalitas yang tidak terkontrol sehingga menciptakan adanya sikap ekstremisme. Hal ini membantah bahwa akar radikalisme adalah kemiskinan. Berbagai kelompok radikal tersebut justru malah dari kalangan kelas menengah mapan yang ingin menunjukkan identitasnya.

Selain karena perbedaan geografi dan juga mazhab, kemunculan adanya kelompok intelektual baru dalam kelas menengah Muslim

memberikan warna baru. Pada umumnya mereka telah melepaskan diri dari dikotomi ikhwan-santri yang terdapat dalam pembahasan konsepsi sebelumnya. Hadirnya kelompok intelektual tersebut cukup terlihat manakala ICMI berjaya di bawah rezim Orde Baru.¹⁷ Selain itu pula di luar wadah ICMI sebenarnya juga terdapat kelompok Islam tradisional yang mencoba eksis di luar lembaga korporatisme negara tersebut. Secara lebih lanjut, apabila digambarkan secara lebih lugas deskripsi mengenai perilaku memilih kelas menengah Muslim tersebut dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut ini.

ICMI sebenarnya merupakan contoh rill dari transformasi partisipasi politik kelas menengah Muslim yang semula berbasiskan pada aksi politik ekstra parlemeter menuju politik intra parlementer. Selain dimaknai sebagai bentuk transformasi, hal itu juga bisa diartikan sebagai bentuk modernisasi. Hal itu ditandai dengan modernisasi pendidikan pesantren menuju pendidikan tinggi dengan pendirian IAIN di berbagai tempat. Kondisi itu pulalah yang mendorong adanya pertumbuhan intelektualisme di antara kalangan kelas menengah yang semula berbasis pada kajian dogmatik ala pesantren menjadi kajian kritis ala perguruan tinggi.¹⁸

Modernisasi itu pulalah yang turut mendorong adanya berbagai macam karakter partisipasi politik kelas menengah Indonesia. Semula secara dominan bernuansa negara-sentris (*state-centered*) menuju pada masyarakat sentris (*societal-centered*). Daripada sekadar mengejar kekuasaan di tingkatan negara lebih baik mengembangkan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi masyarakat kelas menengah Muslim Indonesia sebenarnya telah terfaksi dalam empat kelompok besar. Adapun di luar empat kelompok itu sebenarnya masih banyak kelompok tarekat maupun kelompok afiliasi religius lainnya. Secara garis besar, penjelasan mengenai kelompok kelas menengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

¹⁷ Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (New York: Routledge, 2002), h. 77-78.

¹⁸ Akh. Muzakki, "Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia", dalam Pattana Kitiarsa, *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods* (New York: Routledge, 2008), h. 213.

Tabel 3: Tipologi Perilaku Memilih Kelompok Kelas Menengah

No	Parameter Perilaku Memilih	Ikhwan	Santri	Neo-Ikhwan	Neo-Santri
1	Pemahaman Politik	Loyalis-rasional	Loyalis-tradisionalis	Pragmatis-rasional	Pragmatis-kritis
2	Afiliasi terhadap Partai	Patrimonial	Patrimonial	Independen	Independen-loyalis
3	Kecenderungan Memilih Partai	Partai kader (<i>cadre party</i>)	Partai massa (<i>mass party</i>)	<i>Catch all Party</i>	<i>Catch all party</i>
3	Hubungan dengan Negara	Negara adalah arena perebutan kuasa	Negara adalah arena mencapai tujuan	Negara adalah arena penjamin kebutuhan hak dasar	Negara adalah arena konstestasi gagasan politik
4	Basis Kelas Menengah Muslim	Kelompok profesional perkotaan, birokrat, borjuasi yang <i>being Islamic</i>	Kelompok pedesaan seperti halnya petani, kelompok pedagang kecil	Kelompok kelas menengah muda seperti halnya mahasiswa maupun juga kelompok pengajian . majelis <i>ta'lim</i>	Kelompok migran desa yang berbasis di perkotaan semisalnya saja kelompok intelektual maupun borjuasi kecil

Sumber: diolah dari berbagai macam data

Pertama, kelompok ikhwan. Mereka adalah kelas menengah Muslim yang berbasis di perkotaan. Hal itulah yang mencerminkan watak Islam mereka cenderung kosmopolit dan egalitarian. Perilaku politik yang ditampilkan oleh kelas menengah Muslim ini cenderung labil secara substantif, namun mantab secara emosional dan psikis. Terlebih mengenai

isu agama. Implikasinya adalah budaya partisipasi dan perilaku memilih lebih ditekankan pada budaya literasi populer. Mereka lebih menguatkan relasi nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga lebih mengedepankan pada aspek pelayanan umat. Oleh karena itulah, mereka lebih menyukai *platform* partai politik yang menawarkan ajaran inklusif mengenai agama.

Kedua, kelompok santri. Kelompok kelas menengah ini hadir dari akar tradisional pesantren. Pada umumnya, loyalitas terhadap ulama sangatlah besar karena dianggap sebagai penentu dan penilai solusi atas terjadinya berbagai permasalahan. Dalam urusan politik, kelompok kelas menengah ini memiliki loyalitas sama sehingga memudahkan untuk berorganisasi.

Ketiga, kelompok neo ikhwan yang sebenarnya adalah kelompok kelas menengah transisi dari sekular menuju Islam. Oleh sebab itu, karakter pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam yang berada dalam kelompok kelas menengah lebih bersifat simbolis.

Keempat, kelompok neo santri ini adalah kelompok kelas menengah santri yang mencoba keluar dari aturan ortodoks pesantren. Mereka membentuk komunitas sendiri dengan berupaya merekonstruksi ajaran Islam disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan tabulasi tersebut, posisi perilaku memilih yang ditampilkan oleh berbagai macam elemen kelas menengah itu sangat bervariasi. Kelompok ikhwan dan santri telah bertransformasi dalam berbagai macam kelompok kecil masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat berbagai macam kelompok kelas menengah Muslim tersebut berikut pula dengan perkembangan intelektualisme Islamnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perkembangan Islamisme kini tidak lagi mengarahkan pada pendirian negara, namun lebih mengarahkan pada bentuk pembentukan nilai dan norma perilaku masyarakat. Gelombang intelektualisme dalam kelas menengah Muslim khususnya yang terjadi dalam penduduk urban bisa dianalisis sebagai berikut:

Pertama, kalangan cendekiawan menjadi figur sentral dalam membentuk nalar rasionalitas kelas menengah Muslim Indonesia. Hal tersebut bisa dimaknai dengan menunjuk pada figur kiai, ulama, maupun tokoh Muslim. *Kedua*, tumbuh pesatnya berbagai macam literatur Islam dalam bentuk buku, novel, majalah dan lain sebagainya yang mendorong nilai-nilai Islam tidak lagi bersifat dogmatik, namun juga mengarahkan pada bentuk nilai-nilai sosial. Kedua sumber itulah yang kemudian membentuk dasar kelas menengah Muslim Indonesia.

Definisi intelektual sebenarnya lebih merunut pada perannya sebagai penemu (*inventor*), namun dalam konteks ini kata intelektual diartikan sebagai bentuk kelas sosial masyarakat yang hadir dengan ide-ide kritis-konstruktif dan kritis terhadap permasalahan kontemporer. Hal itulah yang menjadikan kelompok intelektual menjadi kelompok pembaru dalam masyarakat terlebih lagi kelompok kelas menengah Muslim Indonesia. Kelompok intelektual adalah fase lanjutan dari kelompok borjuasi yang telah berjuang eksis di dunia ekonomi, sebelum kemudian beralih ke bentuk partisipasi politik melalui kelas intelektualnya. Adapun kelompok intelektual sebagai ujung tombak partisipasi politik kelas menengah Muslim memilih dalam dua jalur: masuk dalam pemerintahan (*in-government*) ataukah keluar dari pemerintahan (*out-government*).

Perbedaan corak kedua partai dan kelas menengah itulah yang menjadi pintu awal dalam memahami perilaku memilih kelas menengah Muslim kekinian. Bahwa kini dimensi antara modernis maupun tradisional sudah sedemikian plural dan dinamis. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kedua mazhab perilaku memilih tersebut justru bersinergi bahkan terpecah dalam beberapa faksi perilaku memilih.

Islam menjadi poin penting dalam melihat perilaku memilih terlebih lagi dengan munculnya kelas menengah ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Islam adalah kekuatan politik dan nasionalis. Namun jika dibandingkan dengan kelompok nasionalis yang kini sudah semakin membumi dan adaptif dengan modernitas, kelompok islamis

masih mempertahankan identitas asli beserta norma dan perilakunya. Bahkan seringkali nasionalis-islamistis ini menjadi segmen masyarakat kontemporer. Oleh karena itulah, menjadi Islam juga menjadi cara untuk diterima dan memasuki pergaulan masyarakat. Dalam pengertian lainnya “menjadi Islam” juga tidak selalu menjadi religius, namun cukup hanya mengenakan simbolnya saja. *Kedua*, Islam adalah agama sipil yang nilai normanya tidak berlaku bagi hanya kalangan Muslim saja, tapi juga berlaku kalangan non Muslim. Hal inilah yang kemudian menciptakan bahwa Islam menjadi standar penting tata perilaku masyarakat. Begitu pun juga dalam membentuk masyarakat yang kemudian dibangun atas nilai-nilai islami tersebut.

Representasi Kelas Menengah Muslim Indonesia

Membaca representasi kelas menengah Muslim dalam kaitannya dengan representasi politik telah banyak diulas dalam berbagai analisis. Adapun yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jalur politik yang ditempuh oleh kelas menengah Indonesia melalui tiga hal: jalur konstitusional, ekstra parlementer dan juga radikalisme. Ketiganya bermuara pada bentuk representasi politik yang berbentuk pada ruang rekognisi, ruang afirmasi dan juga ruang afiliasi. Secara garis besar, pemahaman mengenai representasi dapat diartikan sebagai suatu sistem, praktik, prinsip keterwakilan kepentingan, politik identitas, ataupun juga persetujuan suatu kelompok terhadap “wakil” yang ditunjuknya. Ketiga hal tersebut merangkum pada suatu muara: kepada siapakah representasi ditujukan dan apa tujuan dari representasi tersebut diadakan?

Representasi secara jelas membawa konsekuensi terhadap artikulasi kepentingan yang ingin dibawa dan diajukan. Terkait dengan hal itu, kepentingan Islam di Indonesia untuk mendirikan negara Islam kini masih menjadi potensi laten, meskipun kini sudah memasuki era damai dengan berupaya membentuk masyarakat Islam. Dalam melihat kasus representasi politik dalam tataran partai politik, misalnya peta perolehan suara yang

dimiliki partai politik Islam sendiri hanya kurang dari setengah dari suara partai nasional, yang bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Komparasi Perolehan Suara Partai Politik¹⁹

Masa Pemilu	Partai Islam		Partai Nasionalis	
	Parpol Peserta Pemilu	Perolehan Suara (%)	Parpol Peserta	Perolehan Suara (%)
1999	19	37,59 persen	29	62,41 persen
2004	7	38,54 persen	17	61,46 persen
2009	9	25,94 persen	35	74,06 persen
2014	5	31,39 persen	7	68,61 persen

Terkait dengan hasil tabulasi tersebut, kita bisa melihat representasi suara yang dialamatkan partai politik Islam cenderung fluktuatif dari setiap *event* pemilu yang sudah terlewati. Sementara kalangan partai nasionalis masih persisten dan konsisten dengan dominasinya terhadap partai Islam. Adanya ketimpangan suara yang dihasilkan antara umat yang diwakili kelas menengah Muslim dengan partainya merupakan permasalahan yang segera untuk dibenahi. Dalam hal ini, partai Islam kurang memainkan fungsinya sebagai kekuatan politik yang mampu menjembatani aspirasi dalam ranah informal dengan kebijakan dalam ranah politik formal. Ada beberapa analisis yang bisa dikupas dalam melihat ketimpangan tersebut. *Pertama*, ketiadaan keterikatan secara sosio-politis antara partai Islam dan kelas menengah di luar gelaran pemilu tidak tercerminkan sama sekali. Hal ini membuat suara kelas menengah Muslim menjadi tidak fokus ke dalam suatu partai. *Kedua*, ketiadaan figur

¹⁹ Moch. Nurhashim, et.al, *Masa depan Partai Politik Islam Pascareformasi* (Ringkasan Hasil Penelitian tidak dipublikasikan) (Jakarta: P2P-LIPI, 2015), h. 7.

Islam yang kuat. Sekarang ini kelas menengah dihadapkan pada pencarian figuritas Muslim urban dinamis. Sementara partai lebih mencondongkan pada figur konservatif. *Ketiga*, ketiadaan rumusan politik yang jelas dari partai Islam dalam berpolitik, apakah hanya sekadar menjadi peserta pasif atau berperan dalam menciptakan perubahan politik mendasar.

Terlebih adanya kegamangan dalam merumuskan representasi politik di antara kelas menengah Muslim Indonesia, apakah harus menempuh sebagai jalur politik formal atautkah jalur informal. Bagi mereka yang menempuh jalur politik formal, representasi yang dibangun lebih condong memformalkan diri dalam bentuk lingkaran kekuasaan. Sedangkan bagi mereka yang menempuh jalur informal, mereka hanya berkembang sebagai kekuatan kelompok kepentingan atau penekan. Hal yang perlu dicatat dalam membahas aspirasi dengan mengatasnamakan Islam itu hanya sekadar kiasan untuk menutupi kepentingan politik yang jauh. Pada dasarnya representasi kelas menengah Muslim tersebut beragam jenis, yang tidak hanya sebatas isu syariatisasi semata, akan tetapi juga tentang bagaimana kepentingan individu maupun kelompok terwadahi.

Kesimpulan

Membaca tipologi karakter kelas menengah Muslim Indonesia berikut pula perilaku memilihnya telah mengarahkan pada bentuk pertanyaan penting: apakah mereka berpotensi hadir sebagai kelompok perubahan atau kelompok adaptif? Pertanyaan itu menjadi penting mengingat variasi tipologi kelas menengah Muslim Indonesia menjadikan partisipasi politik mereka menjadi rumit untuk dibaca. Tulisan ini secara sederhana telah berusaha memetakan tipologi tersebut berdasarkan dinamika dan kecenderungan politik yang berkembang. Namun untuk sampai pada dinamika internal, tentunya perlu penyelidikan lebih mendalam. Catatan penting yang perlu digarisbawahi dalam membaca kelas menengah Muslim Indonesia adalah mereka masih mencari bentuk

basis maupun identitas politik yang tepat dalam mengartikulasikan kepentingan.

Pilihan untuk tetap menyematkan kata “Muslim” dan juga “Islam” bukanlah perkara mudah bagi kelompok kelas menengah. Penerimaan masyarakat secara umum lebih memandang bahwa Islam adalah agama di ruang publik, namun tidak perlu untuk mengeksklusifkan diri. Sementara kelas menengah Muslim senantiasa berupaya menjadikan Islam dan Muslim sebagai kendaraan politik. Adapun di level politik formal, pertarungan dengan kelompok nasionalis mengemuka dalam upaya merebutkan ruang-ruang kekuasaan. Pada akhirnya, kelompok kelas menengah Muslim Indonesia masih meraba-raba untuk meletakkan diri pada posisi yang tepat baik dalam relasi dengan negara, relasi dengan masyarakat dan relasi dengan internal. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tensi sikap oposisi terhadap kedua entitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim, *Islam sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Furnivall, J.S., *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, London: Cambridge University Press, 1967.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hanifa, Afriza, “Ini Penyebab Parpol Islam Selalu Kalah,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/15/mlajoy-ini-penyebab-parpol-islam-selalu-kalah>, diakses tanggal 13 September 2016.
- Hasbullah, Moeflich, “Cultural Presentation of the Muslim Middle Class in Contemporary Indonesia, dalam Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2, 2000.
- Jati, Wasisto Raharjo, “Agama dan Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi Perbandingan Agama”, dalam Jurnal *Al-Qalam*, Vo. 30, No.2, Mei, 2013.
- _____, “Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia”, dalam Jurnal *Teosofi*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Kuntowidjojo, “Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950”, dalam *Prisma*, No. 11, 1985.
- Kersten, Carool, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, New York: Oxford University Press, 2015.
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Muzakki, Akh., “Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia”, dalam Kitiarsa, Pattana, *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods*, New York: Routledge, 2008.
- Nurhashim, Moch., *Masa depan Partai Politik Islam Pasca Reformasi* (Ringkasan Hasil Penelitian tidak dipublikasikan) Jakarta: P2P-LIPI, 2015.
- Porter, Donald J., *Managing Politics and Islam in Indonesia*, New York: Routledge, 2002.

- Republika, *Ini Hasil Lengkap Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg 2014*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgv5-ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014>, diakses tanggal 13 September 2016.
- Schwarz, Adam and Jonathan Paris, *The Politics of Post-Subarto Indonesia*, New York: Brooking Press, 1999.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2004.
- Van Klinken, Gerry & Berenschot, Ward (eds.), *In Search of Middle Indonesia*, Leiden: Brill, 2014.
- Wichelen, Sonja van., *Religion, Politics and Gender in Indonesia: Disputing the Muslim Body*, New York: Routledge, 2010.
- Zen, Fathurin, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2004.